

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Partisipasi Politik

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Echols & Shadily, 2000). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010).

Partisipasi merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan diri pada setiap individu dalam situasi dan kondisi suatu kelompok, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan dalam suatu kelompok, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama. Dalam perkataan yang lebih luas partisipasi pada hakekatnya adalah ikut sertanya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar. Partisipasi hanya punya makna kalau disertai dengan rasa tanggung jawab oleh mereka yang ikut ambil bagian dalam aktivitas tersebut. Istilah partisipasi politik diterapkan pada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik seperti halnya seorang pemilih atau pemberi suara berpartisipasi dengan memberikan suaranya, seorang Menteri Luar Negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijaksanaan Luar Negeri. Istilah tersebut lebih diterapkan pada orientasi politik daripada aktivitas politik karena warga Negara berpartisipasi dengan menaruh minat dalam politik.

Menurut Sundariningrum (Sundaningrum, 2001) dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Langkah awal untuk memahami partisipasi politik yaitu dengan memahami istilah kata politik. Istilah politik berasal dari kata Yunani, "*polis*" yang secara harfiah berarti negara/kota, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Inggris, seperti *polity*, *politic*, *politics*, *political*, *politician*, *police* dan *policy* (Kantaprawira, 2004). Kata polis (negara/kota) memiliki arti khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat, yaitu pertama, mengacu pada negara bangsa (*nation-state*) yang menunjukkan masyarakat nasional; kedua, mengacu pada negara pemerintah (*government state*) yang menunjukkan penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional (Duverger, 2007). istilah politik ini sangat dipengaruhi oleh para filsuf Yunani Kuno abad ke-5 SM seperti

Plato dan Aristoteles. Kedua filsuf ini mendefinisikan politik sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik yang didalamnya ada kebahagiaan, hubungan keakraban dan moralitas yang tinggi. Berdasarkan pemikiran Plato dan Aristoteles ini, maka sebenarnya sejak semula semua manusia telah berpolitik kapanpun dan dimanapun karena setiap individu atau kelompok masyarakat selalu diperhadapkan dengan berbagai kebutuhan dan berusaha untuk mewujudkan kebutuhan baik melalui cara yang positif maupun negatif untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan atas kebutuhan itu (Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Cetakan ke-15, 2015).

Setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan dan bernegara. Partisipasi warga negara dapat mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan politik partisipasi warga negara tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pimpinan negara saja, tetapi partisipasi warga negara tersebut juga mampu secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sesuai dengan istilah partisipasi, maka partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik. Kegiatan warga negara pada dasarnya dibagi dua, yakni: (L, 2007)

- a. mempengaruhi isi kebijakan umum, dan
- b. ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik, tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik.

Definisi partisipasi politik secara umum yaitu tentang menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan umum. Hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik. Di luar bentuk tersebut, masih ada ragam bentuk lainnya. Partisipasi politik secara sederhana dapat

diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pembuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Salim, 2019). Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam (Rohaniah dan Efriza 2015:471) Partisipasi Politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka (Rohaniah & Efriza, 2015).

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Dari pengertian tersebut, jelas bahwa partisipasi politik lebih dialamatkan pada aktivitas masyarakat (warga negara) dalam turut memikirkan kehidupan negara. Kegiatan partisipasi politik tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan penguasa, dan pelaksanaan segala kebijaksanaan penguasa (pemerintah). Terwujudnya partisipasi murni menunjukkan bahwa jalinan komunikasi antara elite infrastruktur (elit berkuasa) dengan jalinan harmonis. Untuk mewujudkan partisipasi murni, masyarakat harus lengkap dan cukup menerima pesan komunikasi (termasuk transformasi nilai-nilai) dan informasi tentang langkah kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi

kebijakan pemerintah. Sedangkan menjelaskan sebagai definisi umum bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan partai politik sebagai pelaku utama (Budiardjo, 2008).

Menurut “kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk”. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner (Rahman, 2007). Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ ketidakpuasan warganegara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang terbagi dalam “dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional” (A, Teori-teori Politik, 2012).

Menurut Huntington dan Nelson (Sahid, 2011) mengungkapkan bahwa politik mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan tetapi bukan sikap-sikap. Dalam hal ini komponen-komponen subjektif seperti orientasi-orientasi politik yang meliputi pengetahuan politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai

kompetisi dan keefektifan politik, dan persepsi-persepsi mengenai relevansi politik tidak dimasukkan. Hal-hal seperti sikap dan perasaan politik hanya dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bentuk tindakan politik, tetapi terpisah dari tindakan politik.

- b. Subyek yang dimasukkan dalam partisipasi politik itu adalah Negara preman (*private citizen*) atau lebih tepatnya, orang per orang dalam perannya sebagai warga Negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik, seperti pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat partai, calon politikus, *lobby* professional. Kegiatan yang disebut partisipasi politik ini bersifat terputus-putus, hanya sebagai sambilan atau sebagai pekerjaan sewaktu-waktu (*evocational*) dan bersifat sekunder saja dibandingkan dengan peranan-peranan sosial lainnya.
- c. Kegiatan dari apa yang disebut partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat yang pemerintah yang mempunyai wewenang politik. sasarannya adalah untuk mengubah keputusan-keputusan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat itu, mengubah atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan main politiknya. Tujuan itulah yang menjadi batasan partisipasi politik terlepas apakah itu legal atau tidak. Karena itu, aktivitas seperti misalnya protes-protes, huru hara, demonstrasi, kekerasan, bahkan pemberontakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah merupakan bentuk-bentuk partisipasi politik.
- d. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak, berhasil atau tidak.

- e. Partisipasi politik mencakup partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan. Partisipasi otonom adalah kegiatan politik yang dilakukan atas kemauan sendiri, sedangkan partisipasi yang dimobilisasi adalah karena keinginan dan digerakkan orang lain

Substansi partisipasi merupakan makna terdalam yang ada pada konsep partisipasi itu sendiri. Eko Sutoro dalam bukunya *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat* menggagas tiga substansi dari partisipasi yang terdiri dari *voice*, akses, dan *control* (Loekman, 1995). Sementara itu, partisipasi masyarakat menurut Soemarto adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. Pengabaian terhadap faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sumarto, 2009).

2.1.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Ada beberapa bentuk partisipasi, di antaranya sebagai berikut (Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, 2013)

- a. Partisipasi vertikal Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.
- b. Partisipasi horizontal Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa untuk berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D. (2011: 58), dilihat dari bentuknya, partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Partisipasi fisik Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
- b. Partisipasi nonfisik Partisipasi nonfisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan sehingga pemerintah tidak mengalami kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk nonkonvensional, misalnya petisi, kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Menurut Milbrath dan Goel, kegiatan partisipasi dibedakan menjadi:

- a. kelompok apatis: orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik;
- b. spektator: orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum;
- c. gladiator: komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat;
- d. Pengkritik: dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional.

Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator, warga masyarakat, kelompok marginal, dan kelompok terisolasi

Dalam buku Teori-teori Politik (Sitepu, 2012:100) Michael Rush dan Philip Althoff menungkapkan bentuk-bentuk partisipasi politik secara hirarkis adalah sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. Mencari jabatan politik atau administrative
- c. Keanggotaan aktif dari suatu organisasi
- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi
- e. Keanggotaan pasif suatu organisasi
- f. Keanggotaan aktif dari suatu organisasi semi-politik (quasi-political)
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya
- h. *Voting* (pemberian suara)
- i. Apati total

Berbeda dengan Conway, Huntington dan Nelson membedakan bentuk-bentuk partisipasi politik dalam kategori sebagai berikut: (Priambodo, 2000)

- a. *Electoral Activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau pun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. *Electoral Activity* ini juga mencakup pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan umum.
- b. *Lobbying*, yaitu tindakan dari individu atau pun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat atau pun

tokoh politik tersebut terkait masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka.

- c. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik.
- d. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan cara langsung misalnya melakukan komunikasi untuk membangun jaringan kerjasama.
- e. *Violence*, yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah. Penggunaan kekerasan mencerminkan motivasi-motivasi partisipasi yang cukup kuat. Kekerasan dapat ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (huru-hara, pemberontakan) atau mengubah seluruh sistem politik dengan cara revolusi.

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Subakti, 2010). Sementara Michael Rush dan Philip Althof menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan publik. Berbagai definisi partisipasi politik dari para pakar ilmu politik tersebut diatas, secara eksplisit mereka memaknai partisipasi politik bersubstansi *core political activity* yang bersifat personal dari setiap warga negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penetapan kebijakan publik.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam Bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat,

memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, merupakan hal yang sangat penting pula untuk dielaborasi, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga Negara berperan serta dalam proses politik. Menurut pendapat beberapa ahli beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain (Lamaming, 2019):

a. Status Sosial Dan Ekonomi

Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik (Surbakti, 1992).

b. Situasi

Menurut ramlan surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman (Surbakti, 1992).

c. Afiliasi Politik Orang Tua

Afiliasi berarti bergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992).

d. Pengalaman Berorganisasi

Organisasi merupakan suatu system yang mengatur kehidupan masyarakat atau bias diartikan sebagai suatu prilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama (Simangunsong, 2004).

e. Kesadaran Politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat diahidup (Hendrik, 2010).

f. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan (Hendrik, 2010).

g. Stimulan Partisipasi Melalui Sosialisasi Media Massa Dan Diskusi-Diskusi Informal (Hendrik, 2010)

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan partisipasi politik diungkapkan oleh Milbrath, yaitu: pertama, adanya perangsang politik seperti sering mengikuti debat atau diskusi politik baik formal maupun informal; kedua, peduli terhadap isu-isu sosial, politik, budaya, ekonomi, dll; ketiga, status sosial, ekonomi, etnis dan agama yang mempengaruhi persepsi dalam bidang politik; keempat, lingkungan politik yang kondusif dan demokratis akan mendekatkan seseorang dengan dunia politik (Maran, 2007). Lain halnya dengan Frank Lindenfeld yang mengatakan bahwa kepuasan finansial adalah faktor utama seseorang berpartisipasi politik. Dalam studinya, Lindenfeld menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki keamanan ekonomi. Dan Nimmo menambahkan bahwa seseorang berpartisipasi dalam politik dipengaruhi oleh adanya peluang resmi dimana seseorang berpartisipasi politik karena didukung oleh kebijakan negara, kemudian adanya sumber daya sosial serta adanya motivasi personal atau kemauan diri sendiri untuk terlibat dalam dunia politik (Mukarom, 2008).

Tingkat partisipasi politik di setiap negara atau daerah bervariasi sejalan dengan tingkat pembangunan ekonominya (Huntington & Neison, 1994). Dalam masyarakat yang kompleks dan lebih kaya, dengan tingkat industrialisasi dan urbanisasi serta sosio-ekonomi yang lebih tinggi, lebih banyak orang yang terlibat dalam politik dibandingkan dengan masyarakat yang kurang berkembang dan primitif. Tingkat partisipasi politik juga ditentukan oleh kesadaran politik setiap anggota masyarakat (Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* Cetakan ke-15, 2015). Semakin sadar bahwa dirinya diperintah maka ia akan semakin menuntut untuk diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebaliknya,

seseorang tidak menaruh perhatian pada politik disebabkan oleh kesadarannya bahwa pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pemimpin negara kurang memberi apresiasi terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan lebih fokus kepada salah satu kelompok yang membawa keuntungan bagi kepentingan mereka.

Peran media dalam mensosialisasikan pemilu juga dianggap merupakan faktor penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam suatu pemilu. Dengan terinformasikannya pemilu secara luas terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan serta cara pemilihan serta informasi yang lain terkait dengan pemilu, maka akan berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang pemilu yang akan berdampak terhadap partisipasi itu sendiri. Tidak kalah penting dari sosialisasi media, diskusi-diskusi tentang pemilu yang dilakukan secara ringan dan informalpun dianggap punya andil dalam mengakumulasi pengetahuan masyarakat tentang pemilu, yang semua itu pada gilirannya akan diharapkan berdampak positif terhadap tingkat partisipasi dalam pemilu.

Sedangkan faktor penghambat partisipasi politik adalah faktor yang dapat membuat seorang pemilih enggan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Faktor penghambat ini ada 4 yaitu :

- a. Kebijakan induk yang selalu berubah adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh induk organisasi pemilih pemula yang mengenai partisipasi politik yang biasa berubah-ubah dan mengontrol pemilih pemula dalam aktivitas politik dalam hal ini kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai sistem pelaksanaan pemilihan umum berkaitan dengan data kependudukan dan lain-lain.
- b. Pemula yang otonom adalah seorang pemilih pemula yang berhak mengatur dan memilih pilihan atau keyakinan politiknya sendiri namun tidak bebas dan masih terikat, tetap berada dalam

hubungan induk organisasinya yang menjadi tempat konsultasi dan koordinasi.

- c. Dukungan yang kurang dalam hal ini kurangnya dukungan dari keluarga/lingkungan sekitar akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri pemilih untuk turut serta dalam berpartisipasi pada pemilihan.
- d. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif, membangun relasi dengan pejabat-pejabat juga merupakan partisipasi politik, hal ini sah saja dilakukan asal tidak melanggar aturan yang ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	ISI	FOKUS	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Fenomena Golongan Putih Pada PEMILU di Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu (Gugun Faisal R)	Hasil penelitian menunjukan bahwa Konstruksi pengalaman sadar tindakan golput yang dilakukan anggota Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu merupakan tindakan yang didasarkan pada proses	Fenomena Golput (golongan putih) anggota Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu memiliki nilai kajian yang unik untuk memahami dan menganalisis tindakan	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab atas terjadinya perilaku politik golongan putih yang dilakukan oleh masyarakat suku dayak. Sedangkan dalam penelitian ini	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif

		<p>pertukaran simbol komunikasi politik dan makna pengalaman politik yang dialami. Pengalaman adanya kekerasan politik di masa Orde Baru, muncul realitas politik yang menghalalkan segala cara, saling menghina, saling membenci dan saling menyakiti dan adanya konsep ngaji rasa sebagai pedoman hidup untuk memperoleh ketenangan dan ketenteraman diri, sehingga</p>	<p>politik, nilai-nilai kepercayaan dan budaya yang dijalannya dalam kehidupan sehari-hari. Penggalan makna atas tindakan yang terlihat (norma) dan pikiran ideal (noesis) yang ada dalam pikiran anggota Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu menjadi fokus penelitian dalam mendapatkan pengetahuan dan analisis yang lengkap dari aspek</p>	<p>berfokus pada hubungan kekuatan politik yang terdapat di suku dayak tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap partisipasi politik Masyarakat Suku Dayak.</p>	
--	--	---	---	--	--

		<p>golput adalah tindakan pengalaman sadar yang menjauhkan diri dari tindakan yang menyakiti orang lain untuk sekarang dan waktu yang akan datang.</p> <p>Pertimbangan atas tindakan politik yang memiliki alasan atas apa yang pernah dirasakan, dialami dan dipahami (<i>in order to motive</i>) dan begitu juga pemikiran akan harapan dan apa yang diperolehnya di masa yang akan datang (<i>because motive</i>), sehingga menjadikan</p>	<p>pengalaman politik, tindakan kesengajaan politik dan pandangan masyarakat dalam memahami fenomena anggota Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu.</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>anggota Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu yakin atas tindakan kesengajaannya (intensionalitas) untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk ajaran Ngaji Rasa</p>			
2	<p>Kelompok Rentan Dan Tantangan Pemilu Inklusif 2024 Studi Kasus Perilaku Pemilih Pada Komunitas Masyarakat Dayak Bumi Segandu Indramayu (Dede Irawan,</p>	<p>hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat Suku Dayak Bumi Segandu Kabupaten Indramayu tidak memberikan hak pilih dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan</p>	<p>Fokus penelitian ini untuk mengetahui perilaku pemilih dalam komunitas tersebut dengan harapan dapat mendorong Pemilu yang inklusif.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemilih dalam komunitas tersebut dengan harapan dapat mendorong Pemilu yang inklusif. Sedangkan penelitian ini</p>	<p>Memiliki kesamaan objek penelitian yang dijadikan sebuah isu untuk diteliti.</p>

	Muh. Aripin (Nurmantorob)	dikarenakan dua faktor diantaranya 1) prinsip ajaran “Ngaji Rasa” yang mengedepankan instropeksi diri dan tidak ingin menyakiti satu sama lain, komunitas Dayak Indramayu mengaplikasikan ajaran tersebut dalam proses Pemilu dan Pemilihan dengan sikap Golput. Jika kelompok tersebut memilih salah satu calon berarti telah melanggar ajaran Ngaji Rasa karena dianggap telah menyakiti;		bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan kekuatan politik dan suku dayak hindu budha bumi segandu sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik	
--	------------------------------	---	--	---	--

		<p>2) <i>Stakeholder</i> sudah memfasilitasi pendaftaran administrasi kependudukan akan tetapi tokoh Dayak Indramayu masih menolak untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Ajaran “Ngaji Rasa” tersebut bukan doktrin yang harus diikuti seluruh anggota komunitas tersebut, para istri, anak yang cukup usia, perempuan dalam komunitas tersebut diperbolehkan untuk memilih</p>			
--	--	--	--	--	--

		sebagai bentuk kebebasan politik dan juga diperbolehkan untuk mendapatkan surat administrasi kependudukan			
3	Partisipasi Politik Masyarakat Adat di Kampung Naga (Ihsan Fathurrahman, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Soedirman).	Penelitian ini membahas bagaimana partisipasi politik masyarakat adat di Kampung Naga. Fokus kajian menekankan pada Budaya politik dapat tumbuh dan berkembang dalam dimana saja baik dimasyarakat modern, masyarakat tradisional atau masyarakat adat,	Yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai budaya politik di masyarakat adat. Masyarakat adat tersebut bisa dikategorikan ke dalam masyarakat (parokial) yaitu masyarakat yang cenderung pasif, tidak	Ruang lingkup pembahasan sama-sama membahas tentang partisipasi politik	Peneliti terdahulu membahas fokus menekankan pada budaya politik dapat tumbuh dan berkembang dalam dimana saja baik dimasyarakat moderen tradisional atau masyarakat adat, serta masyarakat primitif.

		serta masyarakat <i>primitive.</i>	kritis terhadap kekuasaan.		
--	--	---------------------------------------	----------------------------------	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan menjelaskan sebagai definisi umum bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan partai politik sebagai pelaku utama (Budiardjo, 2008).

Menurut Huntington dan Nelson (Sahid, 2011) mengungkapkan bahwa politik mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- 2.3.1 Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan tetapi bukan sikap-sikap. Dalam hal ini komponen-komponen subjektif seperti orientasi-orientasi politik yang meliputi pengetahuan politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, dan persepsi-persepsi mengenai relevansi politik tidak dimasukkan. Hal-hal seperti sikap dan perasaan politik hanya dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bentuk tindakan politik, tetapi terpisah dari tindakan politik.
- 2.3.2 Subyek yang dimasukkan dalam partisipasi politik itu adalah Negara preman (*private citizen*) atau lebih tepatnya, orang per orang dalam perannya sebagai warga Negara biasa, bukan orang-

orang profesional di bidang politik, seperti pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat partai, calon politikus, lobby professional. Kegiatan yang disebut partisipasi politik ini bersifat terputus-putus, hanya sebagai sambilan atau sebagai pekerjaan sewaktu-waktu (*evocational*) dan bersifat sekunder saja dibandingkan dengan peranan-peranan sosial lainnya.

2.3.3 Kegiatan dari apa yang disebut partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat yang pemerintah yang mempunyai wewenang politik. Sasarannya adalah untuk mengubah keputusan-keputusan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat itu, mengubah atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan main politiknya. Tujuan itulah yang menjadi batasan partisipasi politik terlepas apakah itu legal atau tidak. Karena itu, aktivitas seperti misalnya protes-protes, huru hara, demonstrasi, kekerasan, bahkan pemberontakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah merupakan bentuk-bentuk partisipasi politik.

2.3.4 Partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak, berhasil atau tidak.

2.3.5 Partisipasi politik mencakup partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan. Partisipasi otonom adalah kegiatan politik yang dilakukan atas kemauan sendiri, sedangkan partisipasi yang dimobilisasi adalah karena keinginan dan digerakkan orang lain

Dalam buku Teori-teori Politik (Sitepu, 2012 : 100) Michael Rush dan Philip Althoff menungkapkan bentuk-bentuk partisipasi politik secara hirarkis adalah sebagai berikut:

2.3.1 Menduduki jabatan politik atau administrasi

2.3.2 Mencari jabatan politik atau administrative

- 2.3.3 Keanggotaan aktif dari suatu organisasi
- 2.3.4 Keanggotaan pasif suatu organisasi
- 2.3.5 Keanggotaan pasif suatu organisasi
- 2.3.6 Keanggotaan aktif dari suatu organisasi semi-politik (quasi-political)
- 2.3.7 Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- 2.3.8 Voting (pemberian suara)
- 2.3.9 Apati total

Teori ini digunakan untuk menganalisis hasil temuan lapangan mengenai partisipasi politik Masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan atau pembanding atas realita yang terjadi di masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu. Penelitian ini berbentuk kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan pendekatan studi kasus yang nantinya menghasilkan suatu gambaran terkait partisipasi politik Masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



